

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan bisnis suatu perusahaan pasti melibatkan risiko, termasuk kecurangan. Kecurangan juga biasanya disebut sebagai *fraud*. Kecurangan menjadi masalah utama yang harus diatasi karena hal ini masih sering terjadi di Indonesia. Kecurangan dalam laporan keuangan dilakukan karena salah saji atau disengaja maupun tidak disengaja baik yang berdampak material maupun *nonmaterial*. Kesalahan tersebut harus dihindari karena akan berdampak merugikan pihak perusahaan dan pihak luar seperti pihak kreditor, pemerintah dan pemegang saham (Fachrurroji, 2020). Selain itu, dalam dunia perbankan, hal ini sangat penting menjaga rasa percaya dari nasabah, karena bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai macam layanan keuangan. Dalam menjaga kepercayaan tersebut, tentunya sektor perbankan memberikan berbagai macam kemudahan dan beragam produk menarik bagi nasabah (Tupamahu et al., 2022). Banyak kasus *fraud* yang diberitakan di media telah menarik perhatian masyarakat luas. Berbagai kasus penipuan, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi, telah menunjukkan kepada perusahaan bahwa penipuan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Ini juga menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial tetapi juga berdampak buruk pada reputasi dan citra perusahaan (Trisia & Irianto, 2018).

Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*), *fraud* dibagi menjadi tiga bentuk kecurangan. Pertama, penyalahgunaan aset yang meliputi pencurian atau penggelapan aset perusahaan. Kedua, laporan atau pernyataan palsu yang sengaja dibuat salah. Ketiga, korupsi yang meliputi kerja sama dengan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan perusahaan (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan kesalahan atau keinginan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada, bersama dengan adanya pembenaran (*retionalization*) untuk tindakan tersebut, adalah faktor yang biasanya menyebabkan kecurangan. Istilah yang lebih umum

seperti pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan lainnya sering juga digunakan untuk menggambarkan *fraud* (Aryanti, 2020). Tekanan dapat terjadi apabila pada suatu saat ada hal mendesak yang dialami oleh pelaku kecurangan sehingga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kecurangan, apabila ada kesempatan atau peluang tentu saja keadaan tersebut dapat mempermudah rencana tersebut, serta pembenaran (*retionalization*) atas tindakan yang dilakukan seperti karyawan yang mengetahui keuntungan perusahaan dan beranggapan bahwa keuntungan yang diperoleh sudah sangat banyak sehingga tidak masalah apabila mengambil atau menggelapkan sedikit, atau pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan karena merasa apa yang dilakukan pada perusahaan tidak sebanding dengan imbas yang diterima dari perusahaan (Faiqoh, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan. OJK juga mencatat kerugian perbankan sebesar Rp. 4,62 triliun yang disebabkan oleh penipuan di tengah digitalisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat ancaman dan modus transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*. Penyebab kecurangan ini berasal dari situasi di dalam dan di luar perbankan. Dibandingkan dengan 6.444 insiden pada kuartal pertama tahun 2020, penyebab penipuan di lingkungan eksternal perbankan meningkat menjadi 8.218 insiden pada triwulan kedua tahun 2020 dibandingkan dengan 1.005 insiden di lingkungan internal (Pratiwi, 2021).

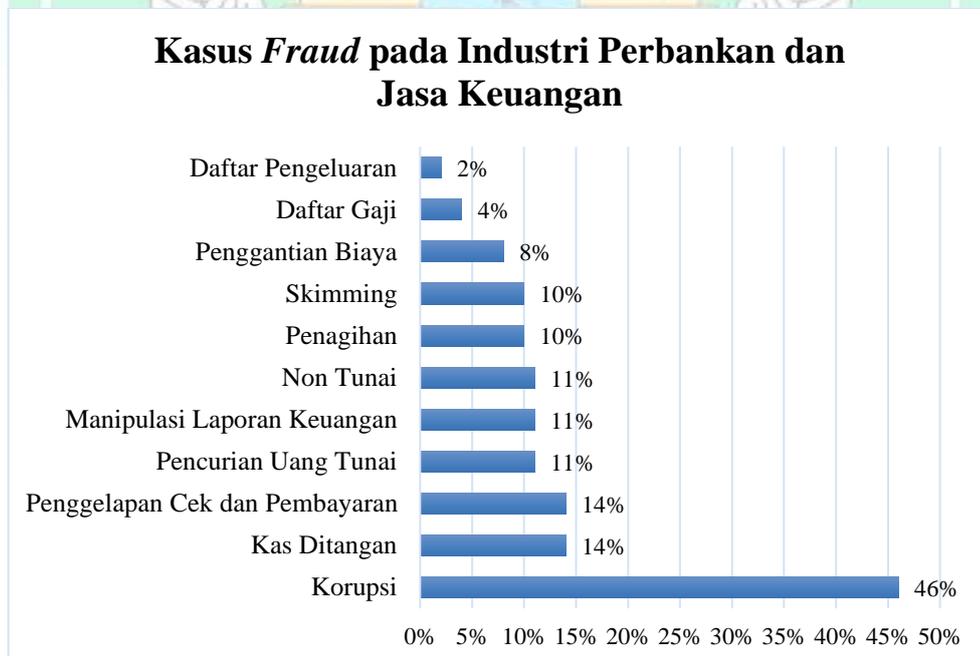
Berdasarkan laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2022, menyajikan data *fraud* dari berbagai industri. Sektor perbankan dan jasa keuangan merupakan industri yang memiliki kasus *fraud* paling banyak jika dibandingkan dengan semua jenis industri, yaitu sebanyak 351 kasus dengan presentase sebesar 22,3% (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2022).

Tabel 1. 1
Jumlah Kasus *Fraud* dari berbagai industri

No	Industri	Kasus	Presentase Kasus
1.	Perbankan dan jasa keuangan	351	22,3%
2.	Pemerintahan dan administrasi publik	198	12,57%
3.	Manufaktur	194	12,33%
4.	Pelayanan kesehatan	130	8,27%
5.	Energi	97	6,16%
6.	Ritel	91	5,78%
7.	Asuransi	88	5,60%
8.	Teknologi	84	5,34%
9.	Transportasi dan pergudangan	82	5,20%
10.	Konstruksi	78	4,95%
11.	Pendidikan	69	4,38%
12.	Informasi	60	3,82%
13.	Pelayanan makanan dan perhotelan	52	3,30%
	TOTAL	1.574	100,00%

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), (2022).

Berikut ini adalah beberapa kasus kecurangan atau penipuan yang terjadi di sektor perbankan dan jasa keuangan (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2022):



Gambar 1. 1
Kasus *Fraud* pada Industri Perbankan dan Jasa Keuangan

Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), (2022).

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menjelaskan banyaknya kasus *fraud* yang terjadi pada industri perbankan dan jasa keuangan, hal ini sesuai dengan hasil peninjauan pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kasus kecurangan yang paling banyak terjadi dan merugikan di sektor perbankan dan jasa keuangan ialah korupsi dengan persentase sebesar 46%, urutan selanjutnya yaitu kas ditangan sebesar 14%, penggelapan cek dan pembayaran 14%, pencurian uang tunai 11%, manipulasi laporan keuangan 11% dan lain sebagainya. Tindakan korupsi menyebabkan kerugian terbesar akibat *fraud*. Ini menunjukkan bahwa korupsi, bersama dengan berbagai bentuk penipuan yang lainnya, menjadi penyumbang terbesar kerugian di Indonesia. Jenis korupsi yang paling umum memiliki kerugian di bawah Rp. 10 juta. Ini menarik karena, baik dalam bentuk korupsi, penipuan laporan keuangan, maupun yang lainnya, kebanyakan kasus berada di bawah Rp. 10 juta tetapi paling banyak terjadi (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), 2022).

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah audit internal. Audit internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu manajemen mendapatkan informasi dengan tujuan menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan (Solechan, 2021). Masa depan organisasi baik pemerintah maupun swasta tidak dapat dipisahkan dari tingkat keandalan efektivitas audit internal. Efektivitas audit internal yang telah ditetapkan adalah sebuah fungsi pengendalian bagi manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Poltak et al., 2019). Audit internal biasanya terdiri dari audit operasional untuk menilai seberapa efektif dan efisien operasi perusahaan. Audit keuangan juga dilakukan untuk menilai laporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang digunakan dalam pengelolaan keuangan (Wibowo, 2023).

Audit internal tentunya memiliki dampak besar untuk mengurangi terjadinya kecurangan disuatu perusahaan. Dengan adanya audit internal tentunya kegiatan pemantauan terhadap pekerjaan seseorang secara otomatis bisa dilaksanakan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan audit internal yang profesional, karena akan

membantu manajemen dalam menghadapi persaingan disuatu bisnis (Nurhasanah, 2020).

Selain itu faktor yang juga diduga berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah pengendalian internal. Tingkat kecurangan pasti meningkat karena sistem pengendalian internal yang buruk. Pengaturan yang terstruktur untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan entitas dikenal sebagai pengendalian internal. Ini digunakan untuk menyusun strategi dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Faiqoh, 2019).

Perusahaan memerlukan audit internal untuk mencegah kecurangan. Dengan mengaktifkan dan menerapkan pengendalian internal, kecurangan dapat dihindari. Kecurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi di suatu organisasi dengan pengendalian internal yang lemah, di sisi lain, organisasi dengan pengendalian internal yang kuat memiliki peluang yang lebih besar untuk menghindari kecurangan dan kelalaian, dan jika terjadi, kecurangan dan kelalaian dapat ditemukan dan dicegah segera. Pengendalian internal termasuk pengawasan, penaksiran risiko, pengendalian lingkungan, dan kegiatan yang diatur oleh informasi dan komunikasi. Pengendalian internal juga sering disebut sebagai pengendalian manajemen. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal sangat penting untuk melindungi aset perusahaan dan mencegah kecurangan (Kusumoaji et al., 2023).

Kasus WorldCom adalah kasus penipuan auditor keuangan yang paling terkenal. WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi yang menyediakan berbagai produk di seluruh dunia, seperti data, internet, komunikasi telepon, dan penjualan kartu telepon prabayar untuk koneksi internasional. Perusahaan berkode saham Wcom di bursa Nasdaq ini memiliki 73.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia. Sebanyak 8.300 orang di antaranya merupakan karyawan yang berdomisili di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (Stephanus & Irene, 2018).

Ketidakpercayaan investor bermula dari pengakuan manajemen WorldCom yang akan mencatatkan kerugian pada tahun 2001 dan kuartal pertama tahun 2002, karena terdapat kesalahan pelaporan akuntansi atas

pengeluaran perusahaan sebesar 3,9 miliar dolar US (hampir Rp 38 triliun). Seharusnya 3,9 miliar dolar US itu dicatat sebagai beban. Namun auditor yang ditunjuk WorldCom justru mencatatnya sebagai pendapatan. KAP Arthur Andersen-lah yang berada dibalik manipulasi laporan keuangan Worldcom. Arthur Andersen diduga mengetahui proses pencatatan biaya operasional ke pos investasi dan menyetujui laporan keuangan palsu WorldCom. Sehingga perusahaan telekomunikasi tersebut mengalami kelebihan pendapatan (overstated) yang seharusnya justru merugi. Dalam kasus ini, *Securities Exchange Commission* (SEC), Badan Pengawas Pasar Modal AS, telah melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya indikasi pelanggaran akuntansi yang dilakukan WorldCom. SEC mengatakan kasus keuangan WorldCom belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan WorldCom kemudian mengumumkan pailitnya. Dengan nilai aset sebesar 103,9 miliar dolar, kebangkrutan WorldCom pada saat itu menjadi yang terbesar di Amerika Serikat (Stephanus & Irene, 2018).

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* yang bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, pada tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah *fraud* terbanyak, yaitu dengan jumlah kasus sebanyak 23. Adapun *Fraud* terbesar di Indonesia adalah korupsi (64%), penyalahgunaan kekayaan negara dan perusahaan (28,9%), dan *fraud* laporan keuangan (6,7%). Salah satu contoh penipuan terbesar ialah pada PT. Asabri, dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaporkan kerugian negara sebesar Rp. 22,78 triliun, PT. Jiwasraya sebesar Rp. 16,81 triliun, dan PT. Indosurya Inti Finance, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengalami kerugian nasabah sebesar Rp. 106 triliun. Ini adalah penipuan paling terkenal di sektor jasa keuangan setelah reformasi dan skandal Bank Century (Patnistik, 2023).

Kasus kecurangan pada perbankan juga pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah terjadinya kredit fiktif pada beberapa bank pada tahun 2018, yaitu kasus yang menimpa Bank Mandiri dan Bank BRI. Sebanyak 5 orang pegawai PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) melakukan pembobolan kredit

senilai Rp. 1,8 triliun dengan modus kredit fiktif. Sedangkan pada Bank BRI cabang Makassar mengalami kerugian yang dilakukan oleh *teller* sebesar Rp. 2,3 miliar (Dewi, 2019).

Fraud merupakan ancaman bagi semua entitas tanpa terkecuali, termasuk pada entitas bisnis berbasis nilai-nilai Islam seperti di Bank Syariah. Pada kasus PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah terus terlibat dalam proses pinjaman fiktif yang diduga merugikan perusahaan senilai Rp. 548 miliar. Sesuai laporan *Good Corporate Governance* (GCG) 2018 yang dikeluarkan perusahaan, dalam satu tahun terakhir telah terjadi empat kecurangan yang secara signifikan merusak operasional perbankan dan posisi keuangan. Benturan kerugian dari *internal fraud* masing-masing di atas 100 juta rupiah. Skandal *fraud* juga terjadi pada tahun 2018 di Bank Syariah Mandiri sebanyak 14 kasus, di Bank Negara Indonesia Syariah sebanyak 11 kasus dan Bank Rakyat Indonesia Syariah sebanyak 4 kasus (Sumber Laporan GCG BSM, BNIS, BRIS). Fakta ini membuktikan rendahnya tingkat ketaatan dengan prinsip-prinsip syariah menawarkan kemungkinan bank-bank Islam bertindak curang. Itulah sebabnya pencapaian prinsip-prinsip hukum Islam sangat penting dalam penghimpunan dan distribusi uang juga layanan perbankan Syariah agar mencerminkan ketaatan (Amin et al., 2022).

Kasus-kasus kecurangan juga menunjukkan bahwa elemen syariah tidak menjamin bahwa bank syariah aman dari penipuan. Meskipun demikian, bank syariah sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim, dalam hal keamanan transaksi keuangan dan legalitas syariahnya. Kasus-kasus ini menunjukkan praktik tata kelola yang buruk, pengendalian internal dan kinerja bank yang buruk, yang menyebabkan penipuan dan kerugian bagi pemilik dan pemerintah (Ngumar et al., 2019).

Pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon terdapat staf yang mempunyai jabatan ganda, yaitu petugas gadai merangkap sebagai *back office*. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*), ketidakefisienan, kesalahan dan penggelapan aset, tentunya diperlukan adanya pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat penting untuk pengendalian internal yang efektif untuk mengatasi kemungkinan kesalahan. Maka dari itu Bank BJB Syariah Cabang

Cirebon harus meningkatkan kualitas audit internal dan pengendalian internal, karena kelemahan pada sistem pengendalian internal perusahaan perbankan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perbankan. (Rahayu, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Bank BJB Syariah Cabang Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kecurangan menjadi masalah utama yang harus diatasi di Indonesia.
- b. Besarnya kasus penyimpangan dan kecurangan laporan keuangan dari industri perbankan yang menimbulkan kerugian.
- c. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah *fraud* terbanyak.
- d. *Fraud* merupakan ancaman bagi semua entitas tanpa terkecuali.
- e. Belum optimalnya peran audit internal dan pengendalian internal khususnya pada industri keuangan dan perbankan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan pada pegawai Bank BJB Syariah Cabang Cirebon.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Pencegahan Kecurangan (*fraud*).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon?
- b. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon?
- c. Apakah audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon.
- c. Untuk menganalisis pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada bank BJB Syariah Cabang Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait audit internal dan pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan pada BJB Syariah Cabang Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, khususnya tentang bagaimana pengaruh audit internal dan pengendalian internal pada pencegahan kecurangan.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami peran audit internal dalam mencegah kecurangan. Mereka dapat menggunakan temuan ini untuk membantu membuat kebijakan perencanaan dan pengendalian yang lebih baik. Serta memberikan manfaat untuk meningkatkan kinerja audit internal, yang akan meningkatkan kualitas audit internal terutama dalam hal pencegahan kecurangan dan efektivitas penerapan sistem manajemen perusahaan yang baik.

c. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep atau perspektif baru tentang pengendalian internal dan audit internal untuk mencegah kecurangan.

d. Bagi *stakeholder*

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat, investor, dan pemegang saham bahwa audit internal dan pengendalian internal yang baik tentunya dapat meningkatkan kinerja bisnis. Serta, investor atau pemegang saham juga dapat memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan atas saham yang ditanamkan kepada perusahaan.

e. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah karena pengendalian internal dan audit internal dapat berguna untuk perusahaan dan investor sebagai alternatif untuk mengukur kinerja manajemen dan audit dalam perbankan syariah.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian berdasarkan fenomena yang sedang terjadi terkait dengan kasus kecurangan pada dunia perbankan. Selain itu, terdapat juga pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN dalam bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab metode penelitian berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dalam bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan, karakteristik responden, uji instrumen penelitian, hasil uji analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penulis tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.